



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pas Kota	Warta Kota

Tarif Parkir Gedung di DKI Dinaikkan

JAKARTA Pemprov DKI Jakarta akan menaikkan tarif pajak parkir gedung/*off street* tahun ini. Kenaikan tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30% tentunya berdampak pada kenaikan tarif parkir.

Kenaikan pajak parkir mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Tujuan lainnya diharapkan mengubah pola pengguna kendaraan bermotor beralih ke moda transportasi massal.

Kami juga akan meningkatkan level di bidang pengawasan, pengendalian, dan law enforcement bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, khususnya penindakan parkir liar.

ANIES BASWEDAN
Gubernur DKI Jakarta

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kenaikan pajak parkir ini bukan dilakukan pada pengelola parkir, melainkan pengguna layanan parkir. Pengusaha hanya berkewajiban menyorkan pajak parkir ke Pemprov DKI, agar pengguna kendaraan bermotor beralih ke angkutan umum.

"Untuk mempercepat perubahan perilaku masyarakat berpindah ke moda transportasi publik yang sekarang sedang disiapkan melalui *mass rapid transit* (MRT), *light rail transit* (LRT), bus Transjakarta, dan moda transportasi yang

terintegrasi," ujar Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.

Selama ini, mekanisme parkir yang dipungut secara manual sangat menyulitkan dalam hal pengawasan. Sistem daring dan pembayaran non tunai harus segera direalisasikan demi meminimalisasi kebocoran pajak. Saat ini Pemprov DKI sedang membuat rancangan perubahan peraturan mengenai pelaporan data transaksi usaha, khususnya pajak parkir daring.

Hal itu dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan sistem daring untuk jenis pajak self assessment yang telah dibangun pembayaran nasional, sekaligus mendukung gerakan nasional non tunai yang dicanangkan pemerintah pusat. "Kami juga akan meningkatkan level di bidang pengawasan, pengendalian, dan law enforcement bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, khususnya penindakan parkir liar," ungkap Anies.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Edi Sumantri menyatakan, UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan tingginya setar 30%. Di Jakarta selama 10 tahun terakhir masih 20% semata-mata di kota-kota penyangga sudah mencapai 25%, padahal pengelolaanya sarnia. Maka itu, Jakarta sebagai ibu kota diusulkan naik menjadi 30%.

"Target pajak parkir sudah kita naikkan menjadi Rp585 miliar dari Rp600 miliar pada 2017. Kami berharap Perda Parkir rampung Juni, sehingga

Juli sudah bisa dirasakan peningkatan pajak," ujarnya.

Seluruh parkir off street yang dikelola swasta telah menggunakan sistem taping, *tap in*, dan *tap out* serta bekerja sama dengan gerbang pembayaran nasional (GPN) yang saat ini diujicobakan. Harapannya tidak ada lagi peluang penghindaran pajak, karena setiap transaksi yang dilakukan pengelola parkir saat itu juga data tererek dalam transaksi gerbang pembayaran nasional.

Tarif layanan parkir yang dikenakan ke pengguna akan diatur melalui peraturan. Peraturan tersebut akan menon-

tukan tarif batas atas dan batas bawah. Pergub disusun setelah Perda

Pajak Parkir terbentuk. "Kalau taruhan pajak parkir sebesar Rp50 miliar per bulan dengan naik 10% penambahannya bisa Rp25 miliar. Semakin cepat realisasinya, maka makin banyak potensi raihan yang dicapai," kata Edi.

Saat ini penambahan kendaraan roda empat baru di Jakarta mencapai 900 unit per hari, sedangkan sepeda motor mencapai 1.700 unit. Semenara itu, ruas jalan tidak bertambah banyak dan tidak se-

banding dengan penambahan kendaraan yang meningkat signifikan.

Selain meningkatkan tarif pajak parkir, bea balik nama kendaraan bermotor (BENKB) juga akan ditingkatkan dari 10% menjadi 15%. Namun, itu hanya berlaku untuk pembelian kendaraan yang pertama. "BENKB kan kendaraan bermotor baru untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor. Kenaikannya hilang dengan parkir," ungkapnya.

Keua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Abraham Langgana (Lulung) menargetkan raperda parkir akan selesai dalam waktu 2,5 bulan. Namun, dia meminta PT Transportasi Jakarta sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang menaungit transportasi di Jakarta segera membentuk rapat koordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya pengusaha angkutan umum untuk mempercepat program *One Karis One Trip* (OK Otrip).

• bima setiyadi

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBRAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tarif Parkir Gedung di DKI Dinaikkan

DONGKRAK PENDAPATAN DAERAH

Kenaikan tarif pajak parkir di Jakarta dari 20% menjadi 30% selain mendongkrak pendapatan daerah juga mampu meminimalisasi laju pertumbuhan kendaraan.

- Kenaikan tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30%

PAJAK PARKIR



TARIF PARKIR DINAIKKAN

- Mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD)
- Diharapkan mengubah perilaku pengguna kendaraan bermotor dengan beralih ke moda transportasi massal sekaligus mengurai kemacetan

PROYEKSI PERPARKIRAN 2018

- Rencananya ada 600 mesin parkir dalam bentuk Terminal Parkir Elektronik (TPE) maupun aplikasi.
- BLU Perparkiran Dinas Perhitungan DKI Jakarta akan menambah 22 TPE di Jalan Suryopraboto, Pasar Baru, dan Batu Tujuh di Jakarta Pusat. Saat ini sebanyak 201 TPE dikelola BLU Perparkiran.

PERSAMAAN SEPUTAR PARKIR

- Masih terciptanya praktik pungutan liar
- Ketersediaan lahan parkir resmi yang terbatas
- Menjeluruha parkir liar oleh taksi online maupun ojek online

KENDARAAN BERMOTOR DI JAKARTA

Total
9,5 juta

- Mobil: 2,4 juta
- Sepeda motor: 7,1 juta

Sumber: Puluhan Metro Jaya/Pemprov DKI Jakarta